

**BRIEFING SHEET**  
**DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**PADA *MEDIA GATHERING* UPDATE ISU DAN**  
**CAPAIAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN**  
**24 OKTOBER 2019**

**I. PENDAHULUAN**

1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan diagendakan menghadiri *media gathering* Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang mengundang wartawan sektor ESDM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.
2. *Media gathering* ini selain bertujuan untuk silaturahmi dengan rekan-rekan media juga sekaligus meng-*update* informasi mengenai capaian kinerja dan beberapa isu subsektor ketenagalistrikan yang sering muncul di media massa.
3. Isu-isu yang akan disampaikan pada *media gathering* ini antara lain:
  - a. Program peningkatan rasio elektrifikasi;
  - b. Persiapan awal kelistrikan untuk Ibukota Indonesia baru;
  - c. Perpres kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya;
  - d. Program 35.000 MW;
  - e. Rencana pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA di tahun 2020;
  - f. Pemulihan kondisi listrik di Ambon (gempa) dan Wamena (kerusakan).

**II. PROGRAM PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI**

1. Rasio elektrifikasi nasional pada bulan September 2019 mencapai angka 98,86%, naik sekitar 0,56% dari bulan Desember tahun 2018. Rasio elektrifikasi yang masih jauh di bawah rata-rata nasional adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (74%) dan Papua (94%).
2. Untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 99,9% di akhir tahun 2019, masih terdapat sekitar 1.103.859 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan harus dilistriki. Dari sekitar 1,1 juta rumah tangga tersebut, berdasarkan Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil verifikasi PT PLN (Persero), 710.008 rumah tangga diantaranya merupakan masyarakat tidak mampu, dimana jaringan listrik sudah ada di depan rumah mereka, namun tidak dapat membayar sambungan pasang baru karena ketidakmampuan ekonomi.
3. Untuk melistriki 710.008 rumah tangga tidak mampu tersebut, pemerintah mengeluarkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu dari program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), APBD yang dianggarkan Pemerintah Daerah, program *one man one hope* PT PLN (Persero) dan program KESDM Peduli.

4. Program BPBL mulai memperlihatkan hasil dimana masyarakat tidak mampu tersebut kini telah mendapatkan sambungan listrik dan rasio elektrifikasi nasional perlahan-lahan meningkat dan diperkirakan rasio elektrifikasi sampai akhir tahun 2019 sebesar 99,23%.

### III. PERSIAPAN AWAL KELISTRIKAN UNTUK IBUKOTA INDONESIA BARU.

1. Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia
2. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.
3. Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Timur dipasok oleh Sistem Interkoneksi Kalimantan yang merupakan interkoneksi antara sub sistem Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan sub sistem Mahakam di Kalimantan Timur.
4. Kondisi kelistrikan di Sistem Interkoneksi Kalimantan adalah:
  - Daya Mampu Netto : 1.569,1 MW
  - Beban Puncak : 1.094,9 MW
  - Cadangan : 474,2 MW (30%)
5. Rasio elektrifikasi (RE) di Provinsi Kalimantan Timur status Juli 2019 adalah 99,99%. Adapun rasio elektrifikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 99,99%.
6. Beban listrik di Kabupaten Penajaman Paser Utara baru mencapai 15,89 MVA yang dipasok dari 1 GI, yaitu GI Petung dengan kapasitas GI sebesar 90 MVA.
7. Beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 MVA yang dipasok dari 3 GI, yaitu GI Karang Joang, GI Manggarsari, dan GI Senipah dengan total kapasitas GI sebesar 290 MVA.
8. Kebutuhan tambahan tenaga listrik di Ibu Kota Baru sekitar 1.196 MW sehingga membutuhkan pembangkit sekitar 1.555 MW (termasuk menjaga reserve margin 30%)
9. Untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Ibu Kota Baru sebaiknya tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem interkoneksi, namun diperlukan tambahan pembangkit baru yang berlokasi dekat atau berada di Provinsi Kalimantan Timur (*island operation*).
10. Berdasarkan RUPTL PLN 2019-2028, tambahan pembangkit sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 691 MW, maka masih diperlukan tambahan Pembangkit baru sekitar 864 MW di Ibu Kota Baru.

11. Optimalisasi Pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung “*Smart & Green City*”.
12. Perlu percepatan pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan Ibu Kota baru, sehingga RUPTL PLN 2019 – 2028 perlu penyesuaian.
13. Spesifikasi penembangan kelistrikan ibukota baru adalah:
  - a. *Zero down time* (perlu minimal 3 layers sumber pasokan tenaga listrik).
  - b. *Circular configuration grid & smart grid* (termasuk dilengkapi *Energy Storage System – ESS*).
  - c. Jaringan tegangan tinggi, menengah, dan rendah (TT, TM, & TR) menggunakan under ground cable.
  - d. Pembangkit EBT untuk menggantikan dominasi PLTU.
  - e. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

#### IV. PERPRES KENDARAAN LISTRIK

1. Regulasi terkait kendaraan bermotor listrik antara lain:
  - a. **Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)**, yang mengatur tentang Kebijakan dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik.
  - b. **Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038 (Kepmen ESDM No. 143K/20/MEM/2019)**, yang mengatur tentang Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan kendaraan bermotor listrik dan *energy storage system* di Indonesia.
  - c. **Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan**, bahwa Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri, pemberian insentif, penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
  - d. **Permen ESDM No. 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero)** sebagaimana telah diubah oleh **Permen ESDM No. 41/2017** yang mengatur tentang Tarif Rp/kWh untuk instalasi pendukung kendaraan bermotor listrik berupa Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

- e. Sedang disusun **Permen ESDM tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik dan Pengaturan Tarif Tenaga Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.**
2. Peran dan Tanggung Jawab Kementerian ESDM dalam kendaraan bermotor listrik antara lain:
  - a. *Standard & Safety*
    - SPKLU wajib memenuhi ketentuan **keselamatan ketenagalistrikan (KESDM)**
    - Sertifikasi instalasi SPKLU oleh Lembaga Inspeksi Teknik (KESDM)
    - Kesesuaian Standar Produk SPKLU oleh Lembaga Sertifikasi Produk (KAN dan KESDM)
  - b. Penyediaan infrastruktur (SPKLU yang Mudah dijangkau, terdapat parkir khusus, dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas
  - c. Tarif tenaga listrik, dimana Tarif Tenaga Listrik (TTL) saat ini mengacu pada golongan tarif L (Layanan Khusus) sebesar Rp. 1.650/kWh x N, dimana  $N \leq 1,5$  (sesuai kesepakatan antara pelanggan dengan PLN).
3. Terkait perizinan SPKLU, Penjualan tenaga listrik pada SPKLU dapat dilaksanakan dengan skema:
  - a. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha
    - SPKLU merupakan milik Pemegang Wilayah Usaha eksisting (Contoh: PLN, Cikarang Litrindo, Bekasi Power, PLN Batam) sehingga tidak memerlukan perizinan baru;
    - SPKLU merupakan milik Pemegang Wilayah Usaha baru.
  - b. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Memiliki Wilayah Usaha dengan Bekerja Sama Dengan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi atau Badan Usaha Lainnya.
    - Badan Usaha melakukan kerjasama dengan PT PLN (Persero) sebagai operator SPKLU. Mirip dengan pola pengelolaan SPBU PT Pertamina (Persero), bahwa pihak Swasta dapat bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjual BBM, namun harga BBM tetap mengacu pada penetapan harga PT Pertamina (Persero). Hal ini dimungkinkan setelah Badan Usaha memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (IUJPTL) Bidang Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

## V. PROGRAM 35.000 MW

Kemajuan program 35.000 MW s.d. September 2019 adalah sebagai berikut:

### A. Pembangkit Tenaga Listrik:

1. Sampai dengan September 2019, proyek pembangkit yang telah memasuki tahap operasi (COD) sekitar 3.860 MW (11%), tahap konstruksi sekitar 23.165 MW (65%), telah kontrak/PPA sekitar 6.923 MW (20%), proses pengadaan sekitar 829 MW (2%), tahap perencanaan sekitar 734 MW (2%);
2. Penyelesaian pembangkit telah mencapai 3.860 MW (11%), apabila dilihat secara total, proyek yang telah kontrak/PPA mencapai sekitar 33.947 MW (95,60%), hanya tersisa 1.563 MW (4,40%) yang belum kontrak/PPA. 11% proyek yang telah COD tersebut sebagian besar terdiri dari PLTG/MG, PLTU dibawah 200 MW, PLTM dan EBT Skala kecil (PLTS, PLTBn, PLTBm, PLTBg) karena memang masa konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat (sekitar 12-24 bulan). Sedangkan 65% proyek yang masih tahap konstruksi antara lain terdiri dari PLTGU, PLTU diatas 100 MW, PLTP dan PLTA dimana persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama;
3. Sementara itu 20% proyek pembangkit yang telah kontrak/PPA, saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai *financial closing/effective date* dimana untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL). Sedangkan sisa 4% ditargetkan tuntas proses pengadaannya paling lama tahun ini;

### B. Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk:

1. Sampai dengan September 2019, proyek jaringan transmisi yang telah beroperasi mencapai 18.542 kms (39%), sementara 15.838 kms (33%) dalam proses penyelesaian, dan sisanya sekitar 13.199 kms (28%) masih tahap pra-konstruksi; dan
2. Sampai dengan September 2019 Proyek GI yang telah beroperasi mencapai sekitar 65.270 MVA (57%), sementara 23.634 MVA (21%) dalam proses penyelesaian, dan sisanya sekitar 25.420 MVA (22%) masih tahap pra-konstruksi.

## **VI. RENCANA PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK GOLONGAN 900 VA DI TAHUN 2020**

1. Regulaasi yang berlaku saat ini terkait tarif dan subsidi listrik adalah
  - PERMEN ESDM No. 28/2016 Jo. No. 18/2017 Jo. No.41/2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (PERSERO)
  - Permen ESDM No. 29/2016 Jo. No. 32/2018 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga
  - PMK No. 44/PMK.02/2017 Jo. No. 18 /PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
2. Kebijakan subsidi listrik tahun 2020:
  - Memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM);
  - Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah;
  - Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan
  - Mengembangkan energi baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

## **VII. PEMULIHAN KELISTRIKAN di AMBON DAN WAMENA**

1. Kementerian ESDM terus memantau pemulihan kondisi kelistrikan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pasca gempa yang terjadi di Ambon dan sekitarnya pada tanggal 26 September 2019 dan pasca kerusakan yang terjadi di Wamena tanggal 23 September 2019.
2. Berdasarkan laporan PT PLN (Persero), pemulihan kelistrikan pasca gempa bumi 6,8 SR di Ambon hingga tanggal 18 Oktober 2019 telah pulih 100%. Untuk sistem Amb, dilaporkan bahwa 867 Gardu telah beroperasi, 667,47 kms jaringan tegangan menengah telah beroperasi dan 180.963 pelanggan telah menyala. Daya mampu sekitar 68.300 kW dan Beban Puncak 46.200 kW.
3. Berdasarkan laporan PT PLN (Persero), pemulihan sistem kelistrikan di Wamena juga telah 100% dengan 142 gardu telah beroperasi, 180 kms JTM telah beroperasi, 337 kms JTR telah beroperasi, dan 20.800 pelanggan telah menyala. Daya mampu mencapai 6,5 MW dengan beban pucak 4,7 MW.